

## Tinjauan Peran Pendidikan Politik Dalam Kehidupan Demokrasi Generasi Z

Siti Kholiza Aulia<sup>1</sup> Siti Zahara Saragih<sup>2</sup> Panggih Nur Adi<sup>3</sup> Zindan Baynal Hubi<sup>4</sup>  
Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu  
Pendidikan, Universitas Labuan Batu<sup>1,2,3</sup>  
Sekolah Pascasarjana Pendidikan Kewarganegaraan, Universitas Pendidikan Indonesia<sup>4</sup>  
Email: [Sitikholizaaulia5@gmail.com](mailto:Sitikholizaaulia5@gmail.com)<sup>1</sup>

### Abstrak

Gen-Z merupakan agent of change atau garda perubahan politik bangsa Indonesia agar menuju kehidupan demokrasi yang relevan. Pendidikan politik merupakan langkah fundamental untuk mengubah cara pandang Gen-Z agar tidak terkontaminasi sifat apatis dan berpikir kritis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Penelitian ini menggunakan metode tinjauan pustaka atau literature review dengan mengumpulkan berbagai literatur yang relevan dengan topik. Tahapan penelitian meliputi kegiatan membaca, menganalisis, mengevaluasi, dan mensintesis berbagai literatur relevan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas Gen-Z menganggap bahwa politik merupakan sesuatu yang bersifat kotor, kejam, dan koruptor, Sensivitas Gen-Z terkait politik muncul karena hegemoni eksternal diri yaitu media sosial. Pendidikan politik dikalangan Generasi Z menjadi suatu kewajiban agar mereka yang merupakan lumbung bonus demografi Indonesia tahun 2024 menjadi partisipasi politik yang cerdas, aktif, dan mampu berpikir secara kritis, bukan hanya bersifat apatis atau kapitalistik. Langkah pendidikan politik bagi generasi Z salah satunya ialah tauladan yang positif dari pejabat politik yang memegang kebijakan. Hal itu untuk menunjukkan budaya kehidupan yang baik sebagai suri tauladan atau contoh baik kepada masyarakat. Langkah selanjutnya ialah pelaksanaan sosialisasi pendidikan politik bagi generasi Z yang dilaksanakan oleh Bawaslu, KPU, maupun instansi lainnya. Selain itu, pendidikan politik yang bernuansa menghibur dan menghindari isu agama, SARA digelorkan melalui media sosial.

**Kata Kunci:** Gen-Z, Demokrasi, Pendidikan Politik

### Abstract

*Gen-Z is an agent of change or the vanguard of political change in the Indonesian nation towards a relevant democratic life. Political education is a fundamental step to change Gen-Z's perspective so that it is not contaminated by apathy and critical thinking in national and state life. This study uses a literature review method by collecting various literature relevant to the topic. The research stages include reading, analyzing, evaluating, and synthesizing various relevant literature. The results of this study indicate that the majority of Gen-Z considers politics to be something dirty, cruel, and corrupt. Gen-Z's sensitivity to politics arises because of the external hegemony of the self, namely social media. Political education among Generation Z is an obligation so that those who are the granary of Indonesia's demographic bonus in 2024 become intelligent, active political participants, and are able to think critically, not just apathetic or capitalistic. One of the steps in political education for Generation Z is a positive role model from political officials who hold policies. This is to show a good culture of life as a role model or good example to society. The next step is the implementation of political education socialization for generation Z carried out by Bawaslu, KPU, and other agencies. In addition, political education that is entertaining and avoids religious and SARA issues is promoted through social media.*

**Keywords:** Gen-Z, Democracy, Political Education



This work is licensed under a [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

### PENDAHULUAN

Politik merupakan aspek kehidupan yang bersifat independensi dan mampu menghegemoni segala aspek kehidupan lainnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Aspek politik menjamin segala terciptanya kebijakan yang dapat mempengaruhi hajat hidup masyarakat dalam suatu negara. Peran politik menjadi vital, hal ini disebabkan karena negara Indonesia menganut sistem demokrasi yang memberikan kebebasan kepada masyarakat dalam berpartisipasi melaksanakan kehidupan bernegara (Hubi et al., 2022). Menurut Abraham Lincoln bahwa cara yang mudah diingat untuk menjelaskan demokrasi yaitu pemerintahan yang berkualitas berasal dari rakyat, dijalankan oleh orang-orang yang dipilih rakyat, dan tujuan akhirnya adalah untuk kesejahteraan rakyat itu sendiri (Juanda, 2023). Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana rakyat mempunyai power legacy secara tidak langsung melalui wakil-wakil yang dipilih dalam pemilihan umum. Wakil-wakil ini bertugas menghimpun dan mengeloborasikan aspirasi rakyat yang terbaik untuk negara (Majid & Sugitanata, 2021). Melalui sistem demokrasi memberikan kesempatan yang seluas-luasnyabagi masyarakat untuk memberikan segala bentuk aspirasi dan suara kepentingan masyarakat tanpa adanya intervensi atau tekanan pihak manapun. Hadirnya demokrasi secara tidak langsung memberikan angin segar untuk masyarakat grassroots terhadap semua keresahan atau impian-impian mereka yang dapat disampaikan oleh wakil rakyat mereka.

Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang menerapkan sistem demokrasi dalam menjalankan sistem pemerintahannya, hal ini mengakibatkan sistem politik berjalan secara masif dan menjadi katalisator hajat manusia Indonesia karena mampu memberikan dan memutuskan segala kebijakan melalui mekanisme politik. Dalam kerangka kebebasan yang bertanggung jawab, setiap warga negara berhak untuk berserikat dan berkumpul guna mewujudkan aspirasi politiknya. Prinsip kesetaraan menjamin setiap individu memiliki kedudukan yang setara dalam berbangsa dan bernegara, terlepas dari perbedaan status sosial. Kebersamaan menjadi kunci dalam menghadapi segala tantangan yang dihadapi bangsa (Pasaribu, 2017) Pemilihan umum merupakan manifestasi empirisme dari prinsip kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi Indonesia. Melalui mekanisme ini, rakyat berhak memilih secara langsung para pemimpin dan wakil-wakilnya untuk menjalankan pemerintahan. Hasil pemilu akan menentukan komposisi anggota legislatif dan eksekutif. UUD 1945 menjamin hak politik setiap warga negara, termasuk hak untuk memilih dan dipilih dalam penyelenggaraan pemilu (Maydani et al., 2024).

Melalui mekanisme pemilihan umum yang dilaksanakan setiap lima tahun sekali untuk memilih wakil di legislatif dan eksekutif menjadikan peranan masyarakat menjadi hal yang fundamentalis dan menjadi premis berlakunya sistem demokrasi. Tetapi, dalam pelaksanaan kehidupan demokrasi terdapat berbagai macam problematika, seperti tingkat pendidikan politik yang rendah, kurangnya sosialisasi politik, dan stigma negatif terhadap dunia politik (Dewi et al., 2022). Berbagai macam tindakan negatif yang dilakukan terkait pemilihan umum kerap terjadi di masyarakat, baik dalam tataran atas ataupun grassroots. Pelaksanaan Pilkada Kota Serang tahun 2018 menunjukkan adanya berbagai kendala dan kelemahan, salah satunya adalah maraknya praktik politik uang. Data Bawaslu Kota Serang mencatat lebih dari 100 kasus pelanggaran, yang sebagian besar terjadi pada tahapan kampanye (Culiah & Dermawan, 2022).

Selain itu, kasus penyebaran isu yang tidak terkonfirmasi kebenarannya dapat membuat kegaduhan ditengah-tengah masyarakat. Data yang dirilis Kominfo pada Desember 2016 mengungkapkan adanya sekitar 800 ribu situs web di Indonesia yang menjadi sumber penyebaran hoaks dan ujaran kebencian. Angka ini menunjukkan betapa masifnya penyebaran informasi yang tidak benar dan berpotensi merusak tatanan sosial (Sosiawan & Wibowo, 2020) Kondisi secara realitas yang terjadi dapat mengakibatkan polarisasi, dan fragmentasi ditengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya improvisasi pelaksanaan pemilihan umum agar mampu memberikan budaya demokrasi sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang telah ditetapkan para pendiri bangsa Indonesia (Baynal et al., 2023). Masyarakat Indonesia terutama

Gen-Z menjadi patronase progresifisme peradaban kehidupan politik. Hal ini dikarenakan bahwa Gen-Z adalah generasi yang tumbuh bersama teknologi sejak lahir. Mereka sangat bergantung pada internet dan gadget dalam kehidupan sehari-hari (Nabila et al., 2023) Berdasarkan data kependudukan, generasi Z yang berusia antara 12 hingga 27 tahun diperkirakan akan mencapai sekitar 75,94 juta jiwa pada Pemilu 2024, atau sekitar 27,95% dari total jumlah pemilih (Setiawan & Djafar, 2023) Jumlah populasi yang signifikan, generasi Z menjadi target utama berbagai kampanye politik. Namun, maraknya hoaks dan informasi yang tidak akurat membuat mereka kesulitan dalam menentukan pilihan. Keraguan ini berpotensi menurunkan partisipasi politik (Zulkarnaen et al., 2020).

Potensi golput dan sikap apatis mulai terasa dikalangan Gen-Z, hal ini didasarkan karena narasi politik yang berisi ujaran kebencian, dan janji kampanye yang kurang diimplementasikan secara maksimal oleh calon pemimpin. Data survei menunjukkan tingkat golput di kalangan Gen Z pada Pemilu 2019 relatif rendah yaitu 4,86%. Namun, potensi peningkatan angka golput tetap perlu diwaspadai. Manipulasi isu golput melalui narasi negatif dapat menjadi alat bagi pihak-pihak tertentu untuk meraih keuntungan politik (Iswardhana et al., 2023) Pemilih pemula dalam hal ini ialah Gen-Z merupakan agent of change atau garda perubahan politik bangsa Indonesia agar menuju kehidupan demokrasi yang relevan, tetapi Gen-Z dalam hal ini kurang memahami terkait pentingnya hal tersebut. Maka dari itu, sosialisasi dan pendidikan politik menjadi manifesto premis yang bersifat empirisme untuk melahirkan pemimpin yang bersifat adaptif dan aspiratif terhadap kepentingan masyarakat secara komperhensif (Hajad & Ikhsan, 2019). Kumorotomo & Pramusinto berpendapat bahwa keberhasilan sistem demokrasi sangat bergantung pada beberapa fakto antara lain adalah tingkat pendidikan politik masyarakat, kesadaran bernegara, kebebasan berpendapat, serta kualitas kepemimpinan yang dipilih oleh masyarakat (Malik et al., 2020). Oleh karena itu, untuk menciptakan keberhasilan sistem demokrasi diperlukan pemahaman pendidikan politik bagi setiap warga negara. Hal ini dilakukan agar masyarakat mampu menilai dan memilih wakil-wakil mereka secara bijaksana, bukan karena faktor finansial atau propaganda yang memberikan kegaduhan ditengah masyarakat. Tujuan pendidikan politik adalah untuk membentuk warga negara yang aktif, bertanggung jawab, dan berpartisipasi dalam kehidupan demokrasi. Pendidikan politik tidak hanya memberikan pengetahuan tentang sistem politik, tetapi juga menanamkan nilai-nilai demokrasi seperti toleransi, partisipasi, dan akuntabilitas (Fales, 2018). Melihat uraian diatas, maka tulisan ini akan mengkaji lebih jauh terkait pandangan Generasi Z terkait politik di Indonesia, pentingnya pendidikan politik bagi Generasi Z dalam kehidupan demokrasi, serta langkah-langkah masif sebagai wujud pendidikan politik untuk generasi Z.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah literature review. Tahapan penelitian meliputi kegiatan membaca, menganalisis, mengevaluasi, dan mensintesis berbagai literatur relevan. Tinjauan pustaka merupakan proses sistematis untuk mengkaji kembali karya-karya ilmiah yang telah dipublikasikan sebelumnya guna membangun kerangka teoretis dan landasan empiris penelitian (Firmansyah & Dede, 2022) Penelitian tinjauan pustaka mengandalkan metode tinjauan pustaka untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari berbagai publikasi ilmiah, seperti jurnal, buku, dan artikel yang relevan dengan topik penelitian (Tri Nuryani et al., 2022) Pada tahap awal, penelitian ini dilakukan dengan melakukan kajian pustaka yang komprehensif. Kajian ini meliputi pencarian, pengumpulan, dan analisis terhadap berbagai sumber literatur seperti jurnal ilmiah, buku, undang-undang, dan peraturan pemerintah yang relevan dengan

topik penelitian yaitu terkait pendidikan politik bagi generasi Z dalam kerangka kehidupan demokrasi.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Pandangan Generasi Z Terkait Politik di Indonesia**

Generasi Z merupakan kelompok generasi yang lahir setelah generasi Y. Rentang waktu kelahiran generasi Z umumnya berada di antara tahun 1995 hingga 2010. Oleh karena itu, individu yang lahir dalam rentang waktu tersebut dapat dikategorikan sebagai bagian dari generasi Z (Kansaki et al., 2021). Generasi Z sangat akrab dengan teknologi dan informasi. Mereka lebih suka mendapatkan informasi secara cepat dan mudah, terutama dalam bentuk visual seperti gambar dan video. Berbeda dengan generasi sebelumnya yang lebih suka membaca buku, Gen Z lebih menikmati informasi yang tersedia di internet. Kombinasi antara kemajuan teknologi dan situasi politik yang lebih terbuka membuat Gen Z Indonesia menjadi generasi yang lincah, spontan, kreatif, dan mahir dalam menggunakan teknologi digital (Hardian & Hermawan, 2022). Generasi Z merupakan kelompok demografis terbesar dan memiliki potensi yang besar untuk membentuk masa depan Indonesia. Namun, rendahnya partisipasi politik dan pemahaman yang terbatas mengenai mekanisme politik menjadi tantangan yang signifikan. Hal ini berpotensi menghambat terwujudnya demokrasi yang representatif (Pratama et al., 2024). Mayoritas Gen-Z menganggap bahwa politik merupakan sesuatu yang bersifat kotor, kejam, koruptor, dan hanya memanfaatkan masyarakat untuk menumpuk kekayaan para pelaku politik.

Aristoteles melihat politik sebagai upaya kolektif untuk mencapai kebaikan bersama. Tetapi, persepsi negatif terhadap politik membuat banyak generasi muda enggan berpartisipasi. Padahal, keterlibatan generasi muda dalam politik sangat penting untuk memastikan bahwa kepentingan dan aspirasi mereka terwakili dan dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan publik (Putra et al., 2024). Generasi Z tumbuh dalam distrupsi teknologi, hal ini ditandai dengan teknologi informasi sangat mudah diakses oleh semua kalangan. Aksesibilitas yang tinggi terhadap gadget telah membentuk karakteristik generasi Z yang sangat bergantung pada teknologi dan terkoneksi dengan jaringan media sosial yang luas. Sensivitas Gen-Z terkait politik muncul karena hegemoni eksternal diri yaitu informasi-informasi yang muncul dari media sosial, hal inilah yang memberikan gambaran kondisi politik nasional. Salah satu alasan anak muda zaman sekarang kurang tertarik sama politik adalah karena banyak masalah di partai politik, seperti korupsi dan ketidakmampuan partai untuk menjalankan tugasnya dengan baik (Haryani, 2024).

Berpolitik hakikatnya membangun ide, gagasan yang kreatif dan inovatif untuk keberlanjutan masa depan bangsa. Pendekatan politik yang menggunakan isu agama, SARA, dan primordial akan memberikan dampak negatif dan apatis bagi generasi Z terkait politik. Hal ini sudah menjadi rahasia umum bahwa Gen-Z merupakan generasi yang lebih menyukai tontonan yang kreatif dan terkesan menghibur bukan malah ujaran kebencian. Teori Demokrasi Partisipatif yang dikemukakan oleh John Stuart dan GDH Cole menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam proses politik. Fenomena ini terlihat jelas pada generasi milenial dan Gen Z yang memanfaatkan platform media sosial seperti Instagram, TikTok, dan Twitter sebagai wadah untuk berpartisipasi dalam diskursus politik (Hutajulu, 2024)

### **Pentingnya Pendidikan Politik Bagi Generasi Z Dalam Kehidupan Demokrasi**

Rusadi Kantaprawira mendefinisikan pendidikan politik sebagai upaya sistematis untuk meningkatkan kesadaran politik masyarakat agar mereka mampu berpartisipasi secara aktif

dalam penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis. Pendidikan politik bertujuan untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, rasional, dan kreatif peserta didik dalam menanggapi isu kewarganegaraan, serta memupuk partisipasi aktif dan bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selain itu, pendidikan politik juga diarahkan untuk membentuk karakter yang berintegritas dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan. Partisipasi politik merupakan hak dasar setiap warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2015 secara tegas mengatur berbagai bentuk partisipasi politik, mulai dari hak menyampaikan pendapat hingga hak mendapatkan keadilan (Sa'ban et al., 2022).

Pendidikan politik bagi generasi Z di Indonesia diarahkan untuk meningkatkan kesadaran akan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 (Hubi & Halimi, 2018), serta mendorong partisipasi aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan politik juga bertujuan untuk membekali generasi muda dengan pengetahuan tentang sistem politik, permasalahan sosial, dan hukum di Indonesia. Pendidikan politik merupakan sarana edukasi bagi Gen-Z yang peranya sebagai gerbang awal untuk memahami kerangka kehidupan politik yang dapat menghegemoni dan pengambil kebijakan dalam masyarakat. Peran pendidikan politik begitu vital untuk menyadarkan bagaimana politik memiliki peran yang krusial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, masyarakat wajib melek terkait isu kewarganegaraan, politik dan sosial agar tidak mudah terintervensi oknum-oknum yang ingin mengambil kesempatan dan mengeksploitasi kekayaan alam atau sumber daya manusia di Indonesia, seperti kaum oligarki, tirani, dll (Siregar, 2023). Sosialisasi pendidikan politik dikalangan Generasi Z menjadi suatu kewajiban agar mereka yang merupakan lumbung bonus demografi Indonesia tahun 2024 menjadi partisipasi politik yang cerdas, aktif, dan mampu berpikir secara kritis, bukan hanya bersifat apatis atau kapitalistik. Sifat-sifat apatis, oportunistik, dan kapitalistik merupakan karakter yang berbahaya dalam kehidupan politik dan kedepannya akan menjadi darah daging yang berimbas pada rendahnya kualitas demokrasi dan yang akan menjadi korban ialah grassroots. Hal ini dikarenakan wakil-wakil yang duduk di parlemen hanya memikirkan kepentingan pribadi atau golongan bukan aspirasi masyarakat yang bersifat mutlak. Pendidikan politik berusaha menyadarkan, mendobrag, membimbing dan menyelamatkan bangsa Indonesia melalui calon-calon pemimpin bangsa yang pada tahun 2045 disebut sebagai generasi emas (Sjoraida & Nugraha, 2023).

Menurut Schumpeter mendefinisikan demokrasi sebagai sistem pemerintahan di mana rakyat memiliki hak untuk memilih pemimpin mereka melalui pemilu. Sosialisasi pemilu merupakan upaya untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat agar mereka dapat menggunakan hak pilihnya secara cerdas. Proses demokratisasi akan berlanjut melalui generasi muda. Oleh karena itu, pendidikan politik sejak dini sangat penting untuk membekali generasi muda dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menjadi pemilih yang cerdas dan bertanggung jawab. Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2018 menjelaskan bahwa pendidikan pemilih sangat penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang proses demokrasi. Hal ini sejalan dengan pendapat Arbi Sanit yang menyatakan bahwa setiap warga negara harus aktif berpartisipasi dalam politik. Sehingga, pendidikan politik bertujuan untuk membekali masyarakat dengan pengetahuan yang diperlukan agar mereka dapat menggunakan hak pilihnya secara cerdas dan bertanggung jawab (Faqih et al., 2022).

### **Langkah dan Strategi Pendidikan Politik Bagi Generasi Z**

Berbagai tindakan positif dalam memberikan pendidikan politik bagi generasi Z sangatlah heterogen, hal ini menjadi upaya untuk menyongsong masa depan demokrasi dan kehidupan masyarakat yang lebih progresif. Salah satu langkah yang progresif ialah dengan tauladan yang

positif dari pejabat politik yang memegang kebijak politik atau public policy. Hal itu untuk menunjukkan budaya kehidupan yang baik sebagai suri tauladan atau contoh baik kepada masyarakat. Langkah ini tentu akan menjadi suatu branding bagi tokoh tersebut, brand adalah pengalaman yang konsisten. Brand pejabat politik yang positif menciptakan pengalaman yang berulang dan dapat diandalkan bagi masyarakat, sesuai dengan nilai-nilai dan manfaat yang dikomunikasikan. Personal branding adalah cerminan diri di mata orang lain, citra pribadi pejabat akan menjadi magnet positif atau negatif masyarakat (Nofianto et al., 2023) Pancasila bukan hanya sekedar ideologi, tetapi juga pedoman hidup bagi seluruh rakyat Indonesia. Para pemimpin harus menjadi pionir dalam mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kepemimpinan yang kuat dan berintegritas sangat penting dalam membangun negara (Hubi et al., 2021). Pejabat negara pemegang kunci patronase bagi rakyatnya dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila. Perilaku pejabat negara akan mempengaruhi perilaku masyarakat. Jika pejabat sering melakukan tindakan yang melanggar hukum atau tidak sesuai dengan nilai-nilai moral, maka masyarakat akan cenderung meniru tindakan tersebut. Hal ini dapat merusak tatanan sosial dan menghambat pembangunan negara (Hubi et al., 2024). Perilaku kolusi, korupsi dan nepotisme yang dilakukan oleh pejabat politik akan menghegemoni masyarakat dan memberikan gambaran bahwa dunia politik dan pejabat politik merupakan sesuatu yang bersifat nirhumanity. Saat pemilihan umum, perilaku pejabat menjadi patokan masyarakat dalam menilai tokoh tersebut, maka dari itu budaya money politic, penyebaran isu agama, isu SARA, serta kapitalisasi suara perlu dihindari sebagai langkah edukasi pendidikan politik terutama untuk Gen-Z yang lebih menyukai sosok tokoh daripada melihat partai politik (S. E. Putri, 2022)

Langkah selanjutnya ialah pelaksanaan sosialisasi pendidikan politik bagi generasi Z yang dilaksanakan oleh Bawaslu, KPU, maupun instansi lainnya. Pendidikan politik adalah cara efektif untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi politik masyarakat. Hal ini dilakukan dengan memberikan pemahaman yang benar tentang sistem politik, kita dapat mendorong masyarakat untuk lebih aktif terlibat dalam proses demokrasi. Menurut Meriam Budiardjo dijelaskan bahwa partisipasi politik adalah upaya warga untuk ikut menentukan kebijakan pemerintah. Hal ini dapat melalui pemilu, demonstrasi, atau cara-cara lain untuk menyampaikan aspirasi. Menurut Mas'ood dan Andrews, partisipasi politik bisa dibagi menjadi dua kategori yaitu partisipasi konvensional yang melibatkan kegiatan-kegiatan yang sudah umum dan diterima seperti memilih, berdiskusi politik, dan bergabung dengan partai politik. Kedua ialah partisipasi non-konvensional yang melibatkan tindakan-tindakan yang lebih ekstrem seperti demonstrasi, mogok, vandalisme bahkan kekerasan (Muhammad et al., 2020)

Istilah sosialisasi politik memiliki etimologis yang heterogen, seperti *political socialization*, *political education*, dan lain-lain. Semua istilah ini mengacu pada proses yang sama yaitu proses penanaman nilai-nilai politik pada individu agar mereka dapat berpartisipasi dalam sistem politik. Berbagai teori tentang sosialisasi politik dari para ahli seperti Almond, Bush, Althoff dapat diintegrasikan ke dalam sebuah model yang komprehensif. Model ini akan membantu kita memahami bagaimana nilai-nilai politik terbentuk dan bagaimana nilai-nilai tersebut mempengaruhi perilaku politik individu dalam konteks sistem politik tertentu. Menurut Mary Grisses dan Robert W. Kweit menjelaskan bahwa sosialisasi politik adalah proses yang berlangsung seumur hidup, di mana individu secara bertahap memperoleh pengetahuan, sikap, dan nilai-nilai politik. Pendidikan politik memiliki peran yang urgensi terutama bagi pemilih pemula. Pelaksanaan pendidikan politik untuk generasi Z akan memberikan wawasan terkait hak dan kewajiban sebagai warga negara serta bisa berpikir kritis dalam memilih pemimpin (Akhmad et al., 2023)

Hal yang menjadi instrumen pendidikan politik bagi generasi Z ialah faktor media sosial, generasi Z merupakan penyumbang bonus demografi terbesar yang lebih menyukai dan akrab dengan media sosial. Sehingga pemberian edukasi pendidikan politik yang bernuansa demokrasi menjadi instrumen fundamental. Generasi Z tumbuh di era digital, sangat berbeda dengan generasi sebelumnya karena mereka sangat akrab dengan teknologi (S. Putri & Prihardini Wibawa, 2023) Dalam beberapa tahun terakhir penggunaan media sosial meningkat pesat. Salah satu platform yang paling populer saat ini adalah TikTok, yang telah mengubah cara kita berkomunikasi dan berinteraksi, terutama di kalangan generasi muda (Ichwanusafa, 2024). Pendekatan politik yang menggunakan isu agama, SARA, dan primordial akan memberikan dampak negatif dan apatis bagi generasi Z terkait politik. Hal ini sudah menjadi rahasia umum bahwa Gen-Z merupakan generasi yang lebih menyukai tontonan yang kreatif dan terkesan menghibur bukan malah ujaran kebencian. Teori Demokrasi Partisipatif yang dikemukakan oleh John Stuart dan GDH Cole menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam proses politik. Fenomena ini terlihat jelas pada generasi milenial dan Gen Z yang memanfaatkan platform media sosial seperti Instagram, TikTok, dan Twitter sebagai wadah untuk berpartisipasi dalam diskursus politik (Hutajulu, 2024).

Generasi Z memiliki kecenderungan lebih menyukai konten yang bersifat menghibur, sehingga pendidikan politik dapat dilakukan dengan konten-konten yang bersifat menghibur dan inspiratif. Hal ini dapat dilihat saat pemilihan Presiden Republik Indonesia tahun 2024 yang dimenangkan oleh Prabowo Gibran. Pasangan tersebut merangkul generasi Z dengan menggunakan kampanye-kampanye yang bersifat menghibur dengan berbagai macam gimick seperti Gemoy, Asam Sulfat dan merangkul berbagai macam influencer. Kampanye Prabowo-Gibran juga lepas dari kampanye yang bersifat propaganda isu agama, SARA, ataupun ujaran kebencian. Hal inilah yang membuat generasi Z memilih dan mencoblos pasangan Prabowo-Gibran, walaupun dalam proses kampanye minim literasi gagasan politik. Hal ini didasarkan bahwa sumber daya manusia Indonesia secara intelektualitas masih rendah serta lebih menyukai kampanye yang bernuansa menghibur (Nadeak, 2024).

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa mayoritas Gen-Z menganggap bahwa politik merupakan sesuatu yang bersifat kotor, kejam, koruptor, dan hanya memanfaatkan masyarakat untuk menumpuk kekayaan para pelaku politik. Sensivitas Gen-Z terkait politik muncul karena hegemoni eksternal diri yaitu informasi-informasi yang muncul dari media sosial, hal inilah yang memberikan gambaran kondisi politik nasional. Salah satu alasan anak muda zaman sekarang kurang tertarik sama politik adalah karena banyak masalah di partai politik, seperti korupsi dan ketidakmampuan partai untuk menjalankan tugasnya dengan baik. pendidikan politik dikalangan Generasi Z menjadi suatu kewajiban agar mereka yang merupakan lumbung bonus demografi Indonesia tahun 2024 menjadi partisipasi politik yang cerdas, aktif, dan mampu berpikir secara kritis, bukan hanya bersifat apatis atau kapitalistik. Pendidikan politik berusaha menyadarkan, mendobrag, membimbing dan menyelamatkan bangsa Indonesia melalui calon-calon pemimpin bangsa yang pada tahun 2045 disebut sebagai generasi emas.

Langkah pendidikan politik bagi generasi Z salah satunya ialah tauladan yang positif dari pejabat politik yang memegang kebijak politik atau public policy. Hal itu untuk menunjukkan budaya kehidupan yang baik sebagai suri tauladan atau contoh baik kepada masyarakat. Langkah selanjutnya ialah pelaksanaan sosialisasi pendidikan politik bagi generasi Z yang dilaksanakan oleh Bawaslu, KPU, maupun instansi lainnya. Selain itu, pendidikan politik yang bernuansa menghibur dan menghindari isu agama, SARA digelorakan melalui media sosial.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdi Muhammad, H., Nopyandri, N., & Babas, U. (2020). Sosialisasi Pendidikan Politik Untuk Siswa Sekolah Pinggiran Kota Jambi Dalam Menghadapi Pilkada Serentak Provinsi Jambi Tahun 2020. *Rambideun: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(3), 19–24. <https://doi.org/10.51179/pkm.v3i3.77>
- Akhmad, Z., Thamrin, U., & Santosa, R. (2023). Sosialisasi Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula Di Smk Negeri 5 Kabupaten Bulukumba. *Ejoin : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(4), 202–216. <https://doi.org/10.55681/ejoin.v1i4.712>
- Baynal, Z., Heny, H., Sapriya, M., Abdul, A., & Heru, K. T. (2023). Analisis Peran Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Mata Kuliah Pengembang Kepribadian dan Karakter di Perguruan Tinggi. 7(2), 2332–2341. <https://doi.org/https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/5705>
- Culiah, L., & Dermawan, A. A. (2022). Praktik Politik Uang Di Kota Serang Provinsi Banten. *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 343–358. <https://doi.org/10.46306/rj.v2i2.46>
- Dewi, L. Y., Sinaga, H. L. N., Pratiwi, N. A., & Widiyasono, N. (2022). Analisis Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Partisipasi Politik Masyarakat di Pilkada serta Meminimalisir Golput. *Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan*, 8(1). <https://doi.org/10.37058/jipp.v8i1.4082>
- Fales, S. (2018). Fungsi Partai Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Ditinjau Dari Hukum Positif. *Al Imarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, 3(2), 199. <https://doi.org/10.29300/imr.v3i2.2152>
- Faqih, M. I., Abdurrahma, A., & Zairudin, A. (2022). URGENSI PENDIDIKAN POLITIK DAN PEMILU TERHADAP PEMILIH PEMULA. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(3), 1809–1815. <https://doi.org/10.31004/cdj.v3i3.8222>
- Fatma Sjoraida, D., & Ruchiat Nugraha, A. (2023). Upaya Peningkatan Pengetahuan Politik Melalui Sosialisasi Pendidikan Politik Bagi Generasi Z. *Jurnal Pengabdian Kolaborasi Dan Inovasi Ipteks*, 1(2), 104–111. <https://doi.org/10.59407/jpki2.v1i2.20>
- Firmansyah, D., & Dede. (2022). Teknik Pengambilan Sampel Umum dalam Metodologi Penelitian: Literature Review. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Holistik (JIPH)*, 1(2), 85–114. <https://doi.org/10.55927/jiph.v1i2.937>
- Frans Nadeak. (2024). Analysis Of The Prabowo-Gibran C Analysis Of The Prabowo-Gibran Campaign Model In The 2024 Presidential And Vice Presidential Elections.
- Hajad, V., & Ikhsan, I. (2019). Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula di SMAN 1 Meureubo Kabupaten Aceh Barat. *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Darma Bakti Teuku Umar*, 1(1), 19. <https://doi.org/10.35308/baktiku.v1i1.1237>
- Hardian, V., & Eric Hermawan. (2022). GAYA KEPEMIMPINAN TRANSFORMATIF UNTUK GEN Z. *KENDALI: Economics and Social Humanities*, 1(1), 32–38. <https://doi.org/10.58738/kendali.v1i1.15>
- Hubi, Z. B., & Halimi, M. (2018). Tipe dan pola pembentukan sikap wathaniyah (kebangsaan) yang dilakukan di lingkungan pesantren al- hikamussalafiyah cipulus purwakarta 1. *J I P I S*, 2(1), 38–47.
- Hubi, Z. B., Fahmi, R., Adhari, N. R., & Nadya, A. (2021). Peran Pesantren sebagai Implementasi Community Civics di Pesantren Nahdlatul Ulama. *Journal of Moral and Civic Education*, 5(1), 56–67. <https://doi.org/10.24036/8851412512021525>
- Hubi, Z. B., Pangestu, I. A., Adhari, N. R., & Supriyadi, E. (2022). The Role of the Regional General Election Commission in Improving Political Participation of Bandung Society. *Soshum: Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 12(1), 24–33. <https://doi.org/10.31940/soshum.v12i1.24-33>



- Hubi, Z. B., Suryadi, K., & Luthfiani, R. S. (2024). Implementasi penguatan pendidikan karakter melalui program bandung masagi di sekolah menengah pertama. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 1(1), 55–63. <https://doi.org/10.21831/jpka.v1i1.69535>
- Iswardhana, M. R., Arisanto, P. T., Chusnul Chotimah, H., Wibawa, A., Risky, L., & Setyo Pratiwi, T. (2023). Sosialisasi Pendidikan Politik Menyongsong Pemilu 2024 Terhadap Generasi Z Di Sman 4 Yogyakarta. *Jurnal Abdi Masyarakat Multidisiplin*, 2(1), 6–10. <https://doi.org/10.56127/jammu.v2i1.574>
- Juanda, O., & Juanda, J. (2023). Peran dan Fungsi Partai Politik Dalam Mewujudkan Pemilu Yang Berkualitas dan Bermartabat Tahun 2024. *Jurnal Ilmu Multidisiplin*, 2(2), 140–147. <https://doi.org/10.38035/jim.v2i2.249>
- Majid, A., & Sugitanata, A. (2021). Sistem Pemilu Sebagai Wujud Demokrasi Di Indonesia: Antara Orde Lama, Orde Baru Dan Reformasi. *Qaumiyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 2(1), 1–21. <https://doi.org/10.24239/qaumiyah.v2i1.18>
- Malik, I., Khaerah, N., Prianto, A. L., & Hamrun, H. (2020). Edukasi politik virtual era demokrasi digital pada sekolah menengah kejuruan. *Masyarakat Berdaya Dan Inovasi*, 1(1), 39–47. <https://doi.org/10.33292/mayadani.v1i2.14>
- Maydani, R., Husna, M. F., Winarti, S. L., Harahap, N., & Ardiansyah, A. (2024). Politik Dinasti di Negara Demokrasi. *Jurnal Syntax Admiration*, 5(3), 950–955. <https://doi.org/10.46799/jsa.v5i3.1075>
- Nabila, L. N., Utama, F. P., Habibi, A. A., & Hidayah, I. (2023). Aksentuasi Literasi pada Gen-Z untuk Menyiapkan Generasi Progresif Era Revolusi Industri 4.0. *Journal of Education Research*, 4(1), 28–36. <https://doi.org/10.37985/jer.v4i1.113>
- Nofianto, E., Fitriyah, F., & Supratiwi, S. (2023). Media Sosial sebagai Sarana Pendidikan Politik oleh Pejabat Publik (Studi pada Akun Media Sosial Nur Hidayat Sardini). *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 23(1), 855. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v23i1.3060>
- Pasaribu, P. (2017). Peranan Partai Politik dalam Melaksanakan Pendidikan Politik. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik Universitas Medan Area*, 5(1), 51. <https://doi.org/10.31289/jppuma.v5i1.1125>
- Pratama, I. N., Hadi, A., & Umami, R. (2024). Penguatan Partisipasi Politik Inklusif Dalam Meningkatkan Pemahaman Dan Keterlibatan Generasi Z Pada Pemilu 2024 Di Desa Bagik Polak. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 1(11), 2986–2993. <https://doi.org/10.59837/jpmba.v1i11.627>
- Putra, T. R., Wahyuni, R. T., Meilani, N., Anjani, M., & Sari, D. K. (2024). Partisipasi Politik Gen Z: Eksplorasi Peran Media Sosial dalam Pembentukan Kesadaran Politik Remaja. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Dan Politik*, 2(1), 61–68. <https://doi.org/10.61476/bpkxy103>
- Putri, S. E. (2022). Pejabat Negara Sebagai Bentuk Kedaulatan Rakyat Dalam Penjelmaan Pancasila. <https://doi.org/10.31219/osf.io/yckhw>
- Putri, S., & Prihardini Wibawa, D. (2023). Peran Media Sosial dalam Keterlibatan Politik Generasi Z. *Indo-MathEdu Intellectuals Journal*, 4(3), 2014–2027. <https://doi.org/10.54373/imeij.v4i3.461>
- Rifki Ichwanusafa, M. P. A. (2024). Pengaruh Media Sosial Tiktok Terhadap Tingkat Partisipasi Politik Mahasiswa Generasi Z di UPN Veteran Jakarta. *MADANI*.
- Sa'ban, L. M. A., Nastia, N., & Wijaya, A. A. M. (2022). Sosialisasi Pendidikan Politik untuk Pemilih Pemula Siswa Sekolah Menengah Atas dalam Menghadapi Pilkada Kota Baubau Tahun 2024. *Jurnal Pengabdian Multidisiplin*, 2(1), 31–37. <https://doi.org/10.51214/japamul.v2i1.207>

- Setiawan, H. D., & Djafar, TB. M. (2023). Partisipasi Politik Pemilih Muda Dalam Pelaksanaan Demokrasi di Pemilu 2024. *Populis: Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 8(2), 201. <https://doi.org/10.47313/pjsh.v8i2.2877>
- Sion Hutajulu. (2024). Digitalisasi Budaya Politik Melalui Peran Generasi Milenial dan Gen Z Di Indonesia. 1(2).
- Siregar, A. N. (2023). Pendidikan Politik Sebagai Wujud Peningkatan Partisipasi dan Kesadaran Kaum Milenial dalam Pemilu Serentak 2024. *Jurnal Generasi Ceria Indonesia*, 1(2), 103–108. <https://doi.org/10.47709/geci.v1i2.3180>
- Sosiawan, E. A., & Wibowo, R. (2020). Kontestasi Berita Hoax Pemilu Presiden Tahun 2019 di Media Daring dan Media Sosial. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 17(2), 133. <https://doi.org/10.31315/jik.v17i2.3695>
- Timori Kansaki, Ngajudin Nugroho, Fauzi Akbar Maulana Hutabarat, Elsera Siemin Ciamas, & Arwin. (2021). Gaya Kepemimpinan Terhadap Motivasi Kerja Gen-Z (Studi Kasus pada Mahasiswa Politeknik Cendana Medan). *ARBITRASE: Journal of Economics and Accounting*, 2(2), 46–50. <https://doi.org/10.47065/arbitrase.v2i2.284>
- Tiyas Nur Haryani. (2024). Penguatan Literasi Politik bagi Generasi Z (Kajian Sebelum Masa Pemilihan Umum 2024). *JKSP*, 1(1).
- Tri Nuryani, F., Nurkesuma Nurkesuma, & Baruna Hadibrata. (2022). Korelasi Keputusan Pembelian: Kualitas Produk, Persepsi Harga Dan Promosi (Literature Review Manajemen Pemasaran). *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 3(4), 452–462. <https://doi.org/10.31933/jemsi.v3i4.977>
- Zulkarnaen, F., Adara, A. S., Rahmawati, A., Wartadiayu, L., & Pamungkas, M. D. (2020). Partisipasi Politik Pemilih Milenial pada Pemilu di Indonesia. *Jurnal Politikom Indonesiana*, 5(2), 55–63. <https://doi.org/10.35706/jpi.v5i2.4554>